

PENGARUH *LEVERAGE*, SAHAM PUBLIK, *SIZE* DAN KOMITE AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mujiyono ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Surakarta

Magdalena Nany

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Surakarta
Jalan R.W. Monginsidi No.36-38, Margoyudan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Diterima: 9 Mei 2010. Disetujui: 26 Juni 2010. Dipublikasikan: September 2010

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai efek *leverage*, saham publik, *size*, proporsi komite audit independen pada pengungkapan sukarela baik secara partial maupun simultan. 74 perusahaan telah dianalisis dengan menggunakan analisis *multiple regression*. Hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* secara tidak signifikan mempunyai efek negatif pada pengungkapan sukarela begitu juga dengan saham publik, *size* dan proporsi komite audit independen yang tidak signifikan pada pengungkapan sukarela.

Abstract

The objective of this research is to give empirical evidence about the effects of leverage, public ownership, size, and independent audit committee proportion on voluntary disclosure both partially and simultaneously. Seventy four companies were analyzed by using multiple regression analysis. The results show that leverage insignificantly has negative effect on voluntary disclosure. Public ownership also insignificantly has negative effect on voluntary disclosure. But size significantly has positive effect on voluntary disclosure. Independent audit committee proportion insignificantly has negative effect on voluntary disclosure. The result also shows that leverage, public ownership, size and independent audit committee proportion simultaneously have insignificant effect on voluntary disclosure.

© 2010 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *annual report; voluntary disclosure; leverage; public ownership; size; audit committee*

Pendahuluan

Laporan tahunan mengkomunikasikan informasi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders*. Laporan tersebut juga merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bagi para manajer dalam organisasi.

Menurut Juniarti (2009) Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi (di luar) dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai

laporan tahunan.

Perusahaan mempunyai kepentingan untuk memberikan pengungkapan secara memadai (Verrecchia, 2001). Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi faktor biaya dan manfaat. Manajemen bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih tinggi dari biayanya. Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarela informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi adalah biaya modal yang rendah (Labelle, 2002).

Kualitas informasi keuangan ditunjukkan dengan seberapa luas tingkat pengungkapan informasi (laporan keuangan). Sampai saat ini belum ada acuan yang dapat dijadikan ukuran kualitas laporan keuangan. Meskipun demikian para peneliti menggunakan *index of disclosure methodology* sebagai indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas. Inhof (dalam Hadi & Arifin, 2002) menunjukkan kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan. Menurut Hendriksen (2000) terdapat tiga konsep mengenai pengungkapan laporan keuangan, yaitu *adequate disclosure*, *fair disclosure* dan *full disclosure*. Dari ketiga konsep ini yang sering digunakan adalah *adequate disclosure*.

Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih tinggi dalam struktur permodalan akan mempunyai biaya keagenan yang lebih tinggi. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditor kepada pemegang saham dan manajer. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditor jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhman (2000) menemukan bahwa variabel kepemilikan saham publik memiliki hubungan yang lemah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan akan berusaha memenuhi keinginan publik yang sebagian besar memiliki saham perusahaan tersebut. Hal ini terkait dengan teori agensi, di mana dalam teori agensi manajemen sebagai pihak agen akan berusaha memenuhi keinginan publik (*stakeholder*) selaku pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan semaksimal mungkin sesuai keinginan pemegang saham publik.

Keberadaan komite audit merupakan suatu persyaratan untuk *listed* di NYSE (*New York Stock Exchange*) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia diantaranya adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di BEJ (Bursa Efek Jakarta) untuk memiliki komite audit. Tugas utama komite audit mencakup pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kendali internal. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kendali internal yang lebih baik.

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya *listing* di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002 yaitu sejumlah 273 perusahaan, tidak termasuk perusahaan dalam industri keuangan. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri keuangan tidak dimasukkan sebagai populasi dalam penelitian ini, karena karakteristik likuiditas perusahaan keuangan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *proportional stratified random sampling*. Dalam metode

tersebut populasi dikelompokkan menurut jenis industri. Dari masing-masing kelompok tersebut kemudian ditentukan sejumlah sampel secara proporsional dan dipilih secara random. Dari jumlah populasi 273 perusahaan ditentukan sampel dengan menggunakan rumus menurut Babbie, Earl (1983) dalam (Muhammad, 2001), sehingga diperoleh sampel sebanyak 74 perusahaan.

Secara garis besar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) pengungkapan sukarela merupakan bentuk pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan oleh pemerintah. Indeks pengungkapan sukarela dapat diukur dengan menggunakan rumus: *The voluntary disclosure index of a company* = V/M, dimana: V = *The voluntary disclosure score (actual)*, M = *The maximum score a company can obtain*, (2) *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Variabel *leverage* dapat diukur dengan menggunakan rumus: *Leverage* = HJP/TA, dimana: HJP = Hutang jangka panjang, TA = Total aktiva. (3) Saham publik merupakan tingkat kepemilikan saham oleh pihak individu di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Persentase kepemilikan saham publik diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki masyarakat dengan jumlah saham yang beredar, dengan menggunakan rumus: $R = n/k$, dimana: R = Persentase kepemilikan publik, n = Jumlah saham yang dimiliki masyarakat, k = Jumlah saham yang beredar (dimiliki perusahaan). (4) *Size* diukur dengan menggunakan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. (5) Komite audit independen merupakan anggota yang berasal dari luar perusahaan atau anggota dewan komisaris yang tidak melakukan tugas-tugas eksekutif dan terdiri paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen. Komite audit independen diukur berdasarkan persentase jumlah komite audit independen.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh *leverage*, saham publik, *size* dan komite audit independen terhadap luas pengungkapan sukarela.

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji regresi pengaruh *leverage*, saham publik, *size* dan komite audit independen terhadap luas pengungkapan sukarela dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Pengaruh *Leverage*, Saham Publik, *Size* dan Komite Audit Independen terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Nilai sig. Uji t	Nilai sig. Uji F
<i>Leverage</i>	-0,036	0,774	
Saham Publik	-0,122	0,320	0,202
<i>Size</i>	0,267	0,035	
Komite Audit Independen	-0,128	0,283	

Sumber: Data diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* memiliki koefisien regresi bertanda negatif dengan nilai *sig* sebesar 0,774. Saham publik memiliki koefisien regresi bertanda negatif dengan nilai *sig* sebesar 0,320. Sedangkan *size* memiliki koefisien regresi bertanda positif dengan nilai *sig* sebesar 0,035. Komite audit independen memiliki koefisien regresi bertanda negatif dengan nilai *sig* sebesar 0,283. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keempat variabel bebas secara bersama-sama memiliki nilai *sig* sebesar 0,202.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Susanto (1992),

Meek *et al.* (1995), Surtijo (1998), dan Hadi & Arifin (2002). Namun tidak sesuai dengan hasil penelitian Mitchell *et al.* (1995), dan Subiyantoro (1997). Tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap luas pengungkapan sukarela, mungkin disebabkan baik kreditor maupun investor kurang memperhatikan kualitas *leverage* perusahaan, sehingga kurang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih tinggi dalam struktur permodalan akan mempunyai biaya keagenan yang lebih tinggi. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditor kepada pemegang saham dan manajer (Meek *et al.*, 1995). Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditor jangka panjang (Wallace *et al.*, 1994). Di samping itu, dalam kondisi *profitable*, perusahaan yang memiliki utang yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi, hal ini dapat digunakan untuk pendanaan operasional perusahaan. Sehingga sumber pendanaan ini merupakan sinyal bagi calon investor untuk ikut berinvestasi.

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan memberikan pengungkapan lebih luas dibanding dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Meskipun hasil penelitian oleh Susanto (1992) menunjukkan hubungan yang lemah antara tingginya kepemilikan saham publik dan luas pengungkapan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Rakhman (2000) menemukan bahwa variabel kepemilikan saham publik memiliki hubungan yang lemah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan akan berusaha memenuhi keinginan publik yang sebagian besar memiliki saham perusahaan tersebut. Hal ini terkait dengan teori agensi, di mana dalam teori agensi manajemen sebagai pihak agen akan berusaha memenuhi keinginan publik (*stakeholder*) selaku pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan semaksimal mungkin sesuai keinginan pemegang saham publik.

Perusahaan besar kemungkinan mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding perusahaan yang kecil. Beberapa alasan dapat menjelaskan pengaruh *size* terhadap luas pengungkapan. Perusahaan besar mungkin memiliki biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan luas pengungkapan. Perusahaan besar mungkin juga lebih kompleks dan lebih mempunyai dasar pemilikan yang luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989). Perusahaan besar lebih mungkin memiliki beragam produk dan beroperasi di berbagai tempat, termasuk di luar negeri. Perusahaan besar juga memungkinkan merekrut karyawan berketrampilan tinggi untuk dapat menerapkan sistem pelaporan manajemen dengan teknologi tinggi sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas. Semua alasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas.

Keberadaan komite audit merupakan suatu persyaratan untuk *listed* di NYSE (*New York Stock Exchange*) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia diantaranya adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di BEJ (Bursa Efek Jakarta) untuk memiliki komite audit. Tugas utama komite audit mencakup pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kendali internal. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kendali internal yang lebih baik. Pincus *et al.* (1989) menguji fungsi komite audit dalam memonitor proses penyusunan laporan keuangan bagi para pemakainya. Pincus mencatat bahwa komite audit dipandang sebagai mekanisme monitoring yang dengan sukarela dipekerjakan dalam situasi biaya agensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas alur informasi antara prinsipal dan agen. Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring berkualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam me-

nyediakan informasi yang lebih baik kepada para pemakai laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham publik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Temuan ini sesuai dengan hasil Rakhman (2000), dan Hadi & Arifin (2002). Ada beberapa alasan yang mungkin dapat menjelaskan hal ini antara lain: (1) pemilik saham publik pada umumnya merupakan investor kecil, sehingga tidak memiliki otoritas atas informasi keuangan maupun non-keuangan yang diinginkan, (2) dalam kenyataan banyak investor lebih mengandalkan pada alat analisis yang bersifat teknis daripada alat analisis yang bersifat fundamental, sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi (di luar) dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek *et al.*, 1995). Perusahaan mempunyai kepentingan untuk memberikan pengungkapan secara memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniati Gunawan (2000); Arifin *et al.* (2001); dan Hadi & Arifin (2002). Hal ini sesuai dengan beberapa alasan bahwa perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding perusahaan yang kecil. Perusahaan besar memiliki biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan luas pengungkapan. Perusahaan besar lebih mungkin memiliki beragam produk dan beroperasi di berbagai tempat, termasuk di luar negeri. Perusahaan besar juga memungkinkan memiliki karyawan berketrampilan tinggi untuk dapat menerapkan sistem pelaporan manajemen dengan teknologi tinggi sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas. Semua alasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan untuk memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Komite audit merupakan salah satu butir dalam penyelenggaraan *good corporate governance*. Semakin meningkatnya kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya *good corporate governance* akan menyebabkan proporsi komite audit independen semakin mendekati homogen yang mengakibatkan tidak adanya perubahan yang berarti dalam proporsi anggota independen. Selain itu diperkirakan adanya kinerja yang kurang baik dari seluruh anggota komite audit independen dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu menurut Willekens (2004) komite audit dipandang sebagai mekanisme monitoring yang dengan sukarela dipekerjakan dalam situasi biaya agensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas alur informasi antara prinsipal dan agen. Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring berkualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih baik kepada para pemakai laporan keuangan.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Saham publik juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun *size* berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Komite audit independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *leverage*, saham publik, *size* dan komite audit independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti untuk penelitian yang akan datang adalah dengan keterbatasan penggunaan data *cross sectional*, ada kemungkinan untuk memperluas

penelitian dengan menggunakan data *time series* untuk menguji konsistensi hasil penelitian, hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,029 yang berarti masih sangat rendah, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel bebas lain yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan, dalam penelitian ini pengukuran luas pengungkapan sukarela bersifat dikotomi. Indeks pengungkapan diukur dengan cara melakukan interpretasi atas laporan tahunan masing-masing perusahaan sesuai dengan kelompok perusahaan sehingga setiap item informasi memiliki bobot yang sama. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila dilakukan pemberian bobot pada setiap item informasi, sehingga dengan item informasi yang lebih terinci akan memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Arifin, D.N., Ibrahim and H. Haron. 2001. The Impact of The Board of Director's Composition, Audit Committee and Firm Size on The Level of Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from The Jakarta Stock Exchange. *Proceeding for The Fourth Annual Malaysian Finance Association Symposium*. 31 st May-1 st June 2002
- Darmawati, R.G.R. Deni & Khomsiyah. (2004). *Hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali
- Gunawan, Y. 2000. *Analisa Pengungkapan Informasi Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*. Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi III
- Hendriksen, E.S. and M.F.V. Breda. 2000. *Accounting Theory*. 5th Ed. Prentice Hall
- Juniarti dan Andriyani S.A. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11 No. 2
- Labelle, R. 2002. *The Statement of Corporate Governance Practices (SCGP) A Voluntary Disclosure and Corporate governance Perspective*. *Journal of Accounting & Economics* Vol. 32, 97-180
- Naim, R. 2000. Analisa Hubungan Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal, Tipe Kepemilikan. *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*
- Nor, H. dan Arifin. 2002. Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Sistem Informasi*. Vol. 1, 90-105
- Rizal, M. 2001. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Di BEJ dan BES*. Tesis tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro
- Verrecchia, R.E. 2001. Essays on Disclosure. *Journal of Accounting & Economics*, Vol. 32, 97-180
- Willekens, M., H. Bauwhede dan A. Gaeremynck. 2004. Voluntary audit committee formation and practices among Belgian listed companies. *International Journal of Auditing*, 8, Iss.3, 207-222